

PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR INKLUSI DI SAMARINDA (STUDI MULTISITUS DI SDN 016, SD ISLAM BUNGA BANGSA DAN SD FASTABIQUL KHAIRAT)

Rakhmatyah, Muchammad Eka Mahmu, Siti Nor Asiah

UINSI Samarinda, Indonesia

Email: adhetya.as@gmail.com, ekamahmud.74@gmail.com, sitinorasiah@uinsi.ac.id

Received: 25-4-2023

Revised: 7-5-2023

Accepted: 5-6-2023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) problematika pembelajaran yang dihadapi oleh sekolah dasar inklusi dan (2) solusi yang dilakukan oleh sekolah dasar inklusi di Samarinda dalam menghadapi problematika yang terjadi. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan deskriptif kualitatif multisitus di tiga sekolah dasar inklusi di Samarinda yaitu SDN 016 Sungai Kunjang, SD Islam Bunga Bangsa (SDIBB), dan SD Fastabiqul Khairat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil temuan yang peneliti temukan di lapangan adalah (1) Problematika - problematika Sekolah Dasar Inklusi di Samarinda adalah guru dan GPK (Guru Pembimbing Khusus) tidak ada yang berlatarbelakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), tidak adanya kerja sama dengan tenaga ahli profesional seperti psikiater, terapis dan juga dokter anak, guru mengalami kesulitan dalam merancang PPI (Program Pembelajaran Individual), guru masih kesulitan dalam melakukan proses belajar mengajar dikelas inklusi dan ini berdampak pada kesulitan guru dalam memberikan penilaian dan evaluasi pada peserta didik berkebutuhan khusus. GPK yang bersertifikasi masih sangat kurang, pelatihan tentang pendidikan inklusi masih sangat kurang, sarana dan prasarana juga masih minim (2) Solusi yang dilakukan oleh sekolah dasar inklusi di Samarinda adalah meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran dengan mengikuti beberapa workshop dan pelatihan-pelatihan tentang pendidikan dan pembelajaran inklusi, merekomendasikan tenaga profesional kepada orang tua yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus seperti: psikolog, dokter anak, terapis dan psikiater, dan kepala sekolah bersama guru -guru melakukan diskusi dan sharing dalam mengevaluasi pembelajaran inklusi di sekolah.

Keywords: Pembelajaran, Inklusi, Problematika

(*) Corresponding Author: -

How to Cite: Samrinda(2023). ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi PAI.

PENDAHULUAN

Tahun demi tahun, persentase anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia semakin banyak. Berdasarkan data BPS di tahun 2005 ABK berjumlah 4,2 juta jiwa, dan tahun 2007 meningkat menjadi 8,23 juta ABK di Indonesia, kemudian data BPS tahun

2017 meningkat jauh menjadi 1,6 juta ABK yang tersebar di Indonesia. <http://m.republika.co.id/berita/nasional>. 17 Juli 2017. Sehingga dapat di simpulkan dari tahun ke tahun jumlah ABK semakin meningkat.

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pelajar Nasional Pasal 12 Ayat 1 Kalimat 8 menjelaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap sekolah berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan minat, dan karakteristik dan kemampuannya, karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, bahkan anak berkebutuhan khusus pun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan seperti anak pada umumnya.

Pada acara dialog interaktif suara disabilitas yang Berlangsung di RRI pro Satu Samarinda, pada hari Rabu tanggal tujuh Agustus 2019 , Kabid PPA Noer Adenany mengatakan, bahwa Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri tahun 2018 jumlah tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kaltim mencapai angka sebesar 3.230 anak. Meskipun ada jaminan negara dan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak anak cacat, Undang-undang Nomor Pasal 20 Ayat 5 Tahun 2003 mengatakan: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan, dan warga negara yang memiliki kekurangan dalam kemampuan fisik, emosional, intelektual, spiritual dan / atau penyandang cacat sosial memiliki hak atas pendidikan khusus.

Pemerintah Indonesia sendiri berusaha meringankan kebutuhan pendidikan ABK dengan mengoperasikan Sekolah Pendidikan Luar Biasa (SLB) yang tersebar di seluruh Indonesia, namun dibandingkan dengan jumlah ABK yang meningkat setiap tahunnya, jumlah SLB tidak dapat menampung ABK. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah mendorong pelaksanaan pendidikan inklusif melalui Undang - undang No. 20 Tahun 2003. Pemerintah Indonesia memperkenalkan pendidikan inklusif untuk memungkinkan dan memberikan hak kepada anak berkebutuhan khusus. Poerwandari, (2017). Pendidikan inklusif adalah sistem pengajaran yang proses pelaksanaannya menghubungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dan memperbanyak sebagian atau seluruh waktu pembelajaran pendidikan luar biasa di kelas-kelas utama, di mana lingkungan sekolah memberikan kebebasan untuk mendukung anak berkebutuhan khusus.

Untuk anak berkebutuhan khusus, pemerintah telah mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB). Di satu sisi, hal ini sangat bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus, namun tanpa disadari hal tersebut menimbulkan sekat antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus karena tidak ada interaksi antara mereka di sekolah. Hal ini menambah tekanan pada ABK dari sudut pandang mental/psikologis, terutama jika digabungkan dengan persepsi lingkungan yang kurang baik tentang siswa pendidikan khusus yang memiliki kekurangan atau berbeda dari anak-anak lain. Dalam Islam, kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain, sekalipun orang tersebut memiliki kekurangan seperti Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Sebagaimana diterangkan dalam QS. ‘Abasa (80): 1-10.

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَرَىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنْ آسَفْتَ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَرَىٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ

Terjemah: "Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena datang seorang yang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pelajaran, lalu pelajaran itu memberi manfaat kepadanya?"

adapun orang yang merasa serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya”.

Tidak semua orang sempurna saat lahir; beberapa orang memiliki cacat fisik atau mental atau terlahir dengan kekurangan lainnya. Pada kenyataannya, mereka berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan orang biasa lainnya. Muslim dari kedua jenis kelamin diharapkan untuk belajar atau memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan, menurut ajaran Islam. Mereka berhak mengenyam pendidikan seperti orang biasa lainnya. Di tempat-tempat di mana anak-anak yang tidak normal atau cacat dididik, maka tidak ada diskriminasi.

Problematika pembelajaran yang sering muncul pada sekolah dasar inklusi adalah tidak adanya kurikulum khusus untuk ABK, melainkan kurikulum nasional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan individual ABK, hal ini menyebabkan kesulitan bagi guru untuk merancang dan mendesain rencana pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing kebutuhan ABK. Latar belakang pendidikan Guru Pendamping Khusus (GPK) bukan dari jurusan PLB (Pendidikan Luar Biasa) sehingga guru kesulitan dalam proses belajar mengajar. Pelatihan-pelatihan masih kurang dan tidak berkelanjutan, sehingga guru mengalami kesulitan dalam menangani dan menstimulus ABK dalam proses pembelajaran. Masih kurangnya motivasi dan kerja sama orang tua dalam mendukung proses pembelajaran pada sekolah dasar inklusi di Samarinda.

Berdasarkan problematika yang sering terjadi pada sekolah inklusi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui problematika apa saja yang terjadi pada sekolah dasar inklusi di Samarinda khususnya pada tiga sekolah dasar inklusi di Samarinda yaitu; SD 016 Sungai Kunjang, SD Bunga Bangsa dan SD Fastabiqul Khairat. Peneliti memilih ketiga sekolah dasar tersebut karena sudah cukup lama menyelenggarakan sekolah inklusi, ke tiga sekolah tersebut menjadi sekolah percontohan sekolah inklusi di kota Samarinda, dan ketiga sekolah tersebut menggunakan kurikulum akomodatif yaitu kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan bakat, minat dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus.

METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan studi Multisitus. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang problematika pembelajaran Sekolah Dasar Inklusi di Samarinda dan bagaimana sekolah tersebut mengatasi problematika tersebut. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, (2014”31-32) meliputi analisis data pada penelitian ini meliputi kondensasi data (Data Condensation), penyajian data (Data Display), verifikasi data dan penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification).

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggali permasalahan dari empat tahapan yang pertama ialah identifikasi dan asesmen, Program Pembelajaran Individual (PPI),

proses belajar, penilaian dan evaluasi. Peneliti menemukan beberapa problematika dan solusi yang dilakukan oleh masing-masing sekolah dalam mengatasi problem yang terjadi.

Problematika yang terjadi ialah tidak tersedianya tenaga ahli pendidikan seperti PLB(Pendidikan Luar Biasa) dan BK (Bimbingan Konseling). Tidak tersedianya tenaga ahli profesional seperti dokter anak, psikiater dan terapis. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru tentang pembelajaran inklusi dapat di lihat dari perencanaan, proses pembelajaran dan evaluasi yang di lakukan. GPK (Guru Pembimbing Khusus) masih sangat minim tidak sesuai dengan jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Sarana dan Prasarana penunjang pembelajaran inklusi masih kurang. Solusi yang di lakukan sekolah ialah meningkatkan kemampuan guru dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan praktik yang berhubungan dengan inklusi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), membantu orang tua untuk menemukan tenaga ahli profesional yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Tidak tersedianya tenaga ahli pendidikan seperti PLB(Pendidikan Luar Biasa) dan BK (Bimbingan Konseling). dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Inklusif (Sesuai Permendiknas No.70 tahun 2009) halaman 24 GPK adalah guru yang memiliki kemampuan sekurang-kurangnya S-1 Pendidikan Luar Biasa dan Kependidikan yang memiliki kompetensi PLB-an. Pendidikan khusus sesuai dengan tuntunan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Faktanya Jurusan PLB belum tersedia di Samarinda.

Tidak tersedianya tenaga ahli profesional seperti dokter anak, psikiater dan terapis Hal ini di jelaskan dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Inklusif (Sesuai Permendiknas No.70 tahun 2009) halaman 16 yaitu penanganan lintas profesi dalam pendidikan inklusif menjadi sesuatu yang harus dilakukan disebabkan karena keragaman karakteristik peserta didik. Hal ini membuktikan bahwa sekolah inklusi membutuhkan kerjasama beberapa pihak, karena problematika dari tidak tersedianya tenaga ahli profesional berdampak pada kesulitan guru dalam menangani dan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru tentang pembelajaran inklusi dapat di lihat dari perencanaan, proses pembelajaran dan evaluasi yang di lakukan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di lapangan ke tiga sekolah inklusi sepakat pelatihan dan praktik tentang pembelajaran inklusi masih sangat minim.

Jumlah GPK yang tidak sesuai dengan jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Dari hasil observasi dan wawancara dari ke tiga sekolah menyatakan GPK yang bersertifikasi hanya satu di masing-masing sekolah, dan ini tidak sesuai dengan Jumlah PDBK yang banyak dan beragam. Sarana dan Prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang pembelajaran inklusi. hal ini di ungkapkan oleh beberapa narasumber dalam wawancara. Adapun solusi yang di lakukan oleh masing-masing sekolah belum maksimal masih membutuhkan dukungan dan kerja sama dari beberapa pihak yang mendukung pembelajaran inklusi dari pemerintah setempat dan beberapa tenaga ahli dan profesional

PEMBAHASAN

1. Problematika Pembelajaran Inklusi

1. Identifikasi dan asesmen

Identifikasi adalah proses penjarangan atau proses penemuan kasus yaitu menemukan anak yang memiliki kelainan tertentu, atau sebagai proses pendeteksian dini pada anak berkebutuhan khusus. Identifikasi dapat diartikan sebagai penyaringan untuk mendapatkan informasi tentang jenis kebutuhan khusus peserta didik. Proses identifikasi dapat dilakukan oleh guru atau tenaga ahli terkait dengan menggunakan instrumen standar maupun non standar.

Berdasarkan pendapat para ahli tentang identifikasi dapat disimpulkan bahwa tahapan identifikasi pada peserta didik berkebutuhan khusus sangatlah penting karena menjadi dasar atau acuan sekolah dasar inklusi untuk melakukan asesmen. Dari ketiga sekolah dasar inklusi di Samarinda yaitu SDN 016, SDIBB dan SD FK telah melakukan proses identifikasi dan asesmen hanya saja dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, karena terdapat beberapa kendala atau problem yang terjadi seperti tidak tersedianya tenaga ahli pendidikan yang berlatar belakang PLB (Pendidikan Luar Biasa) dan BK (Bimbingan Konseling) yang dapat membantu sekolah dalam proses identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, sebagaimana kita ketahui sekolah inklusi itu adalah menggabungkan peserta didik regional dan peserta didik berkebutuhan khusus.

Setelah mengetahui kategori kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus, tahapan selanjutnya adalah asesmen. Kegiatan yang dilakukan tenaga ahli profesional secara khusus untuk mendiagnosa dari gangguan atau kelainan seseorang. Asesmen adalah tindakan untuk mengetahui kondisi peserta didik yang meliputi: potensi dan karakteristik peserta didik dengan tujuan untuk penentuan program pendidikan atau sebagai intervensi untuk meningkatkan beraneka ragam potensi yang dimiliki peserta didik, selain itu juga untuk mengetahui keunggulan dan hambatan belajar peserta didik. Asesmen hanya bisa dilakukan oleh tenaga ahli seperti psikolog, dokter anak, psikiater dan terapis.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai asesmen dapat disimpulkan bahwa sekolah membutuhkan tenaga profesional terkait proses asesmen peserta didik berkebutuhan khusus seperti psikolog, dokter anak, psikiater dan terapis, dalam mendiagnosa kebutuhan dan kemampuan peserta didik secara individual. Tetapi problematika yang terjadi tidak tersedianya tenaga ahli profesional di sekolah dan tidak ada kerja sama sekolah dengan tenaga ahli seperti psikiater, terapis dan dokter anak. Hal ini dijelaskan dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Inklusif (Sesuai Permendiknas No.70 tahun 2009) halaman 16 yaitu penanganan lintas profesi dalam pendidikan inklusif menjadi sesuatu yang harus dilakukan disebabkan karena keragaman karakteristik peserta didik.

Secara umum pembelajaran meliputi, perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Tetap untuk peserta didik berkebutuhan khusus sebelum proses pembelajaran di atas, harus dilakukan proses identifikasi dan asesmen, karena hasil dari identifikasi dan asesmen di jadikan rujukan atau dasar untuk membuat rancangan pembelajaran pada peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini diperkuat dengan fungsi dari asesmen.

Sebagai acuan dasar Program Pembelajaran Individual (PPI)

- 1) Hasil asesmen peserta didik dapat menggambarkan, keunggulan, kelemahan, karakteristik dan juga potensi peserta didik, yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam penyusunan program pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus.
- 2) Sebagai dasar evaluasi dan monitoring
- 3) Standar penilaian, evaluasi dan monitoring peserta didik berdasarkan hasil asesmen yang telah di tetapkan sebelumnya.
- 4) Sebagai dasar pengalihan (referral) Pengalihan terjadi apabila peserta didik di rasa perlu mendapatkan penanganan tenaga ahli yang lebih berkompeten. Misalnya kondisi peserta didik kesulitan dalam mengontrol emosinya dalam kondisi tidak dapat di tentukan, guru sudah melakukan berbagai cara dan tidak ada kemajuan dalam hal positif. Maka perlu dilakukan pengalihan kepada tenaga ahli seperti terapis. Dalam pendidikan inklusi penanganan lintas profesi menjadi sesuatu yang harus dilakukan karena mengingat beragamnya kategori peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan paparan di atas peneliti menyimpulkan pentingnya proses identifikasi dan asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena hasil dari identifikasi dan asesmen adalah dasar atau acuan untuk melakukan pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus seperti merancang perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi. Ke semua tahapan tersebut harus dilakukan secara terorganisir dan saling berkaitan.

Dalam melaksanakan proses identifikasi dan asesmen Sekolah Dasar Inklusi membutuhkan bantuan dan kerja sama dari beberapa pihak yang terkait seperti tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru BK, dan guru PLB. Bantuan dan kerja sama dengan tenaga profesional seperti dokter anak, psikiater, psikolog dan terapis. Hal ini dipaparkan dalam buku pedoman penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai dengan Permendiknas No.70 Tahun 2009) yaitu Sekolah Dasar Inklusi juga membutuhkan kerja sama dengan beberapa lembaga seperti perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga masyarakat setempat.

2. Perencanaan Pembelajaran

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas hasil identifikasi dan asesmen menjadi acuan dasar bagi guru dalam merancang perencanaan pembelajaran inklusi yang di kenal dengan PPI (Program Pembelajaran Individual) yang di mana perencanaan pembelajaran tersebut bersifat individual atau berdasarkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. PPI adalah panduan guru dalam melaksanakan pelayanan pendidikan bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan kemampuan, minat dan kebutuhan peserta didik. Dari ketiga sekolah Dasar di Inklusi di Samarinda sudah merancang perencanaan pembelajaran hanya saja karena banyaknya problematika yang terjadi maka guru masih kesulitan dalam merancang perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Adapun yang menjadi prinsip dasar dalam pembuatan PPI adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan PPI adalah menyesuaikan antara kebutuhan peserta didik, tugas dan perkembangan pembelajaran peserta didik dalam ham mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.

- 2) PPI berpusat pada peserta didik. Setiap dari komponen PPI di fokuskan pada kemampuan dan kebutuhan peserta didik.
- 3) PPI tidak hanya berdasarkan standar kurikulum pendidikan tetapi juga mengacu pada kemampuan non akademik siswa yang terdapat pada hasil asesmen.
- 4) Subjek dasar dalam pembuatan PPI adalah peserta didik. Sehingga kebutuhan, perkembangan, dan minat peserta didik menjadi tujuan dasar dalam mempertimbangkan penyusunan PPI.
- 5) PPI harus bersifat fleksibel terhadap perubahan dan kemajuan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan prinsip dasar kurikulum di atas PPI yang dibuat harus berorientasi pada minat, kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus, hal ini akan berjalan dengan baik apabila sekolah sudah melaksanakan proses identifikasi dan asesmen kepada seluruh peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian guru di berikan pembekalan terkait pembuatan PPI, Jumlah GPK harus sesuai dengan kebutuhan sekolah, karena tugas GPK adalah merancang PPI bersama dengan guru mata pelajaran dan juga psikolog. Problematika guru mengalami kesulitan dalam merancang PPI juga di paparkan oleh

3. Proses Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran guru di tuntut harus kreatif dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas dan juga menyeluruh dapat di terima oleh anak berkebutuhan khusus dan anak reguler. berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di tiga sekolah dasar inklusi adalah guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran karena jumlah GPK yang bertugas membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran sangat minim hanya satu GPK di setiap sekolah, kurangnya kemampuan guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus sehingga guru mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar, ditambah lagi dengan jumlah peserta didik reguler yang juga banyak jumlahnya, latar belakang guru bukan dari jurusan PLB.

Hal ini juga di sampaikan oleh Nissa Tarnoto dalam Jurnalnya “Permasalahan - Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD”. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul atau yang sering di hadapi guru dalam sekolah dasar inklusi adalah masih minimnya Guru Pembimbing Khusus (GPK), kompetensi guru yang masih sangat kurang dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, kurangnya kemampuan guru dalam penanganan peserta didik berkebutuhan khusus, latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai, beban administrasi yang banyak.

4. Penilaian dan Evaluasi

Setelah melakukan proses pembelajaran di kelas yang harus dilakukan guru adalah melakukan penilaian. Evaluasi atau penilaian adalah proses pengukuran kemampuan peserta didik terhadap apa yang sudah dipelajari adapun bentuknya dapat berupa, LKS, penugasan, proyek dan proyek. Adapun tahapan evaluasi atau penilaian di sekolah inklusi mengacu pada kurikulum yang digunakan oleh sekolah inklusi. Pemerintah memberikan dua pilihan kurikulum yaitu kurikulum standar nasional dan kurikulum akomodatif.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian guru masih mengalami kesulitan seperti kurangnya pemahaman guru terhadap penilaian dan evaluasi peserta didik

berkebutuhan khusus, sebelumnya belum atau tidak dilakukan proses Perencanaan Pembelajaran Individual (PPI), PPI yang dirancang tidak sesuai dengan penilaian dan evaluasi yang di berikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, perubahan mood peserta didik berkebutuhan khusus yang gampang berubah-ubah juga menjadi kesulitan guru dalam melakukan penilaian dan evaluasi.

Hal ini juga di paparkan oleh Sukinah dalam jurnalnya, “Sistem Penilaian Hasil Belajar Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Implementasi Pendidikan Setting Inklusi” memaparkan bahwa kurangnya pemahaman guru terhadap sistem penilaian dan evaluasi ABK menyebabkan guru memberikan penilaian yang sama dengan peserta didik reguler. hal yang sama juga di sampaikan oleh Orin Oktorima dalam Jurnal, Penilaian Hasil Belajar Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Inklusif SDN 01 Limau Manis (Penelitian Studi Kasus)”. menyatakan pemahaman guru terhadap penilaian dan evaluasi terhadap anak berkebutuhan khusus masih kurang, sehingga penilaian masih belum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu ABK.

Hal ini juga didasari karena jumlah GPK yang masih sangat kurang, guru kelas dan guru mata pelajaran kesulitan karena beban administrasi yang banyak, jumlah peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus yang banyak, guru kelas dan mata pelajaran bukan dari jurusan PLB.

2. Solusi problematika inklusi

a. Identifikasi dan Asesmen

Dalam melakukan identifikasi dan asesmen Sekolah Dasar Inklusi menghadapi beberapa permasalahan- permasalahan seperti: tidak tersedianya jurusan PLB (Pendidikan Luar Sekolah), Tidak tersedianya tenaga ahli profesional dan tidak adanya kerja sama dengan tenaga ahli profesional seperti dokter anak, psikiater dan terapis. Dari beberapa problematika tersebut Sekolah Dasar Inklusi mencoba menyasati atau mengatasi problematika tersebut dengan meningkatkan potensi guru dengan mengikutsertakan guru dalam workshop dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pendidikan dan pembelajaran inklusi, bekerja sama dengan tenaga ahli psikolog dalam melakukan identifikasi dan asesment, Membantu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dalam mencari tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan anak.

b. Perencanaan Pembelajaran

Masalah yang muncul dalam merancang pembelajaran individual atau di kenal dengan PPI adalah, GPK yang bertugas sebagai orang yang merancang PPI bersama dengan guru mata pelajaran dan dibantu oleh psikolog, kesulitan dalam menjalankan perannya karena jumlah GPK di setiap sekolah hanya satu, sedangkan jumlah anak berkebutuhan khusus yang banyak. Selain itu tidak ada guru yang berlatar belakang PLB, pembekalan dan pelatihan tentang PPI masih kurang. Solusi yang dilakukan sekolah adalah mengadakan diskusi dan sharing sesama guru di sekolah terkait pembuatan PPI, meningkatkan potensi guru dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tentang PPI, GPK bekerja sama dengan guru mata pelajaran dalam mengatasi problematika tersebut. Hal ini di jelaskan dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Inklusif (Sesuai Permendiknas No.70 tahun 2009) halaman 26 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengedukasi, membimbing, mendamping serta meningkatkan kompetensi di bidang inklusi bagi

tenaga pendidik dan kependidikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi.

- 2) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu memfasilitasi tenaga guru pembimbing khusus di satuan pendidikan yang menyelenggarakan inklusif sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu menyediakan dan meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan inklusi terkhusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggara inklusif.

c. Proses Pembelajaran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di tiga sekolah dasar inklusi adalah guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran karena jumlah GPK yang bertugas membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran sangat minim hanya satu GPK di setiap sekolah, kurangnya kemampuan guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus sehingga guru mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar, ditambah lagi dengan jumlah peserta didik reguler yang juga banyak jumlahnya, latar belakang guru bukan dari jurusan PLB. Solusi yang dilakukan di masing-masing sekolah adalah pihak sekolah memaksimalkan kondisi dan situasi yang dimiliki termasuk sarana dan prasarana serta kemampuan para guru.

d. Penilaian dan Evaluasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian guru masih mengalami kesulitan seperti kurangnya pemahaman guru terhadap penilaian dan evaluasi peserta didik berkebutuhan khusus, sebelumnya belum atau tidak dilakukan proses Perencanaan Pembelajaran Individual (PPI), PPI yang dirancang tidak sesuai dengan penilaian dan evaluasi yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, perubahan mood peserta didik berkebutuhan khusus yang gampang berubah-ubah juga menjadi kesulitan guru dalam melakukan penilaian dan evaluasi.

Solusi yang dilakukan sekolah adalah guru memberikan penilaian sesuai dengan standar masing-masing guru yang mengajar berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Dari beberapa solusi yang dilakukan oleh tiga sekolah inklusi di Samarinda. Masih sangat kurang dan belum maksimal membutuhkan dukungan dan kerja sama dengan pemerintah setempat. Hal ini dijelaskan dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Inklusif (Sesuai Permendiknas No.70 tahun 2009) halaman 26 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengedukasi, membimbing, mendampingi serta meningkatkan kompetensi di bidang inklusi bagi tenaga pendidik dan kependidikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi.
- 2) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu memfasilitasi tenaga guru pembimbing khusus di satuan pendidikan yang menyelenggarakan inklusif sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu menyediakan dan meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan inklusi terkhusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggara inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga mengacu pada rumusan masalah yang sudah peneliti buat, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Problematika - problematika Sekolah Dasar Inklusi di Samarinda adalah (1) guru dan GPK (Guru Pembimbing Khusus) tidak ada yang berlatarbelakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), (2) tidak adanya kerja sama dengan tenaga ahli profesional seperti psikiater, terapis dan juga dokter anak, guru mengalami kesulitan dalam merancang PPI (Perencanaan Pembelajaran Individual), (3) guru masih kesulitan dalam melakukan proses belajar mengajar dikelas inklusi, dan ini berdampak pada kesulitan guru dalam memberikan penilaian dan evaluasi pada PDBK, (4) GPK yang bersertifikasi masih sangat kurang, (5) pelatihan tentang pendidikan inklusi masih kurang, (6) sarana dan prasarana juga masih kurang
2. Solusi yang di lakukan oleh Sekolah Dasar Inklusi di Samarinda adalah (1) meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran dengan mengikuti beberapa workshop dan pelatihan-pelatihan tentang pendidikan inklusi dan ABK, (2) bekerjasama dengan psikolog di luar sekolah (3) merekomendasikan tenaga profesional kepada orang tua yang sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus seperti: psikolog, dokter anak, terapis dan psikiater, (4) melakukan diskusi dan sharing sesama guru dalam mengevaluasi pembelajaran inklusi (5) memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Solusi yang dilakukan sekolah masih kurang dan belum maksimal sekolah membutuhkan bantuan dari berbagai pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Republika (2017). Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia [http://m.republika.co.id/berita/nasional.17 Juli 2017](http://m.republika.co.id/berita/nasional.17_Juli_2017).
- Undang-undang Dasar No.20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
- Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur” Di Kaltim ada 3.230 ABK” accessed Desember,12,2022,<https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2019/08/07/di-kaltim-ada-3-230-abk/>.
- UU No.20 tahun 2003 tentang hak-hak anak disabilitas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 tahun 2009.
- Poerwandari, E.K. 2017. Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi.
- Departemen Agama RI, Syamil Al-Qur’an Terjemah Perkata (Bandung:Sygma,2007).

Matthew B. Miles, A. M. Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edition (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014), 31–32